

PENUTUPAN HARI TANI NASIONAL Dilaunching Buku Boyolali Kaya Komoditi



KR-Mulyawan

Launching Buku Boyolali Kaya Komoditas dan Boyolali Kaya Rasa Jilid 2.

BOYOLALI (KR) - Bupati Boyolali, M Said Hidayat menutup penyelenggaraan agenda kolaborasi peringatan Hari Tani Nasional, Bulan Bakti Peternakan, Hari Ikan Nasional dan Hari Pangan Sedunia selama tiga hari mulai Senin hingga Rabu (2-4/9). Selain acara penutupan, Bupati Said juga melaunching Buku Boyolali Kaya Komoditas dan Buku Boyolali Kaya Rasa Jilid 2.

Kepala Dinas Pertanian (DisperTan) Kabupaten Boyolali Joko Suhartono mengatakan, Buku Boyolali Kaya Komoditas menggambarkan keberagaman alam dan lingkungan yang mencerminkan potensi unik suatu daerah. Komoditas pertanian tidak hanya sekedar produk ekonomi, tetapi menjadi simbol keberagaman dan kaya akan warisan alam dan budaya setempat.

Buku tersebut menampilkan 97 jenis komoditas pertanian, meliputi komoditas tanaman pangan, sayuran, biofarma, tanaman hias, tanaman perkebunan, dan tanaman kehutanan. Masing-masing komoditas disertai informasi mengenai profil tanaman, taksonomi, manfaat tanaman dan aspek budidaya. "Harapan kedepan agar generasi muda Boyolali memiliki pemahaman, penguasaan tentang kearifan lokal, khususnya komoditas pertanian di Kabupaten Boyolali, sehingga bisa mengenal, mencintai, mengembangkan, dan melestarikan dimasa yang akan datang," ujar Joko, Rabu (4/9/2024) kemarin.

Said Hidayat mengemukakan, menulis buku tersebut merupakan catatan yang baik tentang kekayaan muatan lokal, apa yang dihasilkan dari tanah Boyolali. Ini adalah upaya menjaga komoditas yang ada di Kabupaten Boyolali. "Terima kasih kepada para petani yang mengolah, menggarap lahan sehingga mampu menghasilkan komoditas - komoditas yang ada di Kabupaten Boyolali," kata Said Hidayat. (Mul)-f

Proyek Kelupas Lahan Eks Pertanian TWR



KR-Edy Susanto

Alat berat digunakan untuk mengelupas lahan TWR yang sebelumnya merupakan lahan pertanian.

SALATIGA (KR) - Proyek pembangunan lanjutan Taman Wisata Religi (TWR) di Jalan Patimura Salatiga dilaksanakan menggunakan APBD Salatiga Penetapan 2024, senilai Rp 2,8 miliar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) Salatiga, Syahdani Onang Prastowo dihubungi membenarkan pembangunan ini.

Dikatakannya, proyek tahun anggaran 2024 ini alokasinya Rp 2,8 miliar untuk proyek pengelupasan (keduk) lapisan tanah yang masih lahan pertanian (eks pertanian). Sehingga lapisan bagian atas yang masih basah diambil. Kemudian setelah itu diurug dengan tanah lain.

"Proyek kelupas tanah pertanian untuk dijadikan lahan baru, kemudian akan diurug. Anggarannya Rp 2,8 miliar," kata Dani kepada KR, Rabu (4/9). Ditanya soal anggaran TWR pada APBD Perubahan 2024, Dani menegaskan bahwa tidak ada anggaran.

Diketahui Pemkot Salatiga membangun Proyek ikon Salatiga Kota Toleran dengan Taman Wisata Religi yang ke depan bakal dibangun tempat ibadah semua agama di Salatiga.

Proyek ini awalnya diinisiasi oleh Walikota Salatiga Almarhum John Manoppo dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). TWR membutuhkan dana besar, hitungan awal tidak kurang Rp 66 miliar pada saat peletakan batu pertama 2021 silam. (Sus)-f



KR-Chandra AN

PETANI garam di Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang siap memanen garam sebelum memasuki musim penghujan pada September ini. Harga per kilogram garam kini cukup stabil di angka Rp 4.000. Sebelumnya harga garam petani sempat jatuh hingga Rp 700/kg. Kini petani Tasikharjo sedang belajar membuat dan mengolah garam siap pakai dari pakar garam asal Jerman yang telah mendampingi selama 3 bulan. Herman, salah satu petani mengungkapkan bila cara baru pengolahan garam siap pakai bisa dilakukan petani dari tambak garamnya langsung, maka akan memberi efek ekonomi yang luar biasa.

Pemprov Jateng Raih Penghargaan Insentif Fiskal

SEMARANG (KR) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sukses meraih penghargaan dari pemerintah pusat berupa Insentif Fiskal sebesar Rp 6,45 miliar, atas keberhasilannya menurunkan angka stunting. Penghargaan diberikan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana.

Demikian dikatakan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana kepada wartawan di Semarang Kamis (5/9) Penghargaan diberikan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta Rabu (4/9). Nana menuturkan, pada 2023 lalu, Jateng juga memperoleh penghargaan yang sama dengan nilai Rp 5,97 miliar. Insentif yang diperoleh akan digunakan untuk menuntaskan penanganan stunting yang masih tersisa di Jateng.

Nana mengatakan, Pemprov Jateng menganggarkan Rp 194,6 miliar untuk percepatan penanganan stunting tahun ini. Anggaran diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota,

terutama yang kasus stuntingnya masih tinggi. Sasarannya adalah kabupaten/kota yang tingkat stuntingnya masih tinggi.

Prevalensi stunting Jateng berdasarkan rilis Survey Kesehatan Indonesia (SKI) pada Maret 2024, di 2023 sebesar 20,7 persen, atau turun 0,1 persen dibandingkan 2022 yang sebesar 20,8 persen. Langkah percepatan penurunan stunting berkolaborasi dengan banyak pihak, baik antar sesama pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, swasta hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

"Jadi memang perlu ada kolaborasi untuk menangani stunting ini. Kita tidak bisa sendirian. Ada keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat juga. Selain itu Pemprov Jateng melakukan intervensi spesifik dan sensitive untuk menangani stunting," tutur Nana Sudjana.

Intervensi sensitif yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah salah satunya dengan memastikan kelayakan air yang dikonsumsi masyarakat. Sedangkan intervensi spesifik dilakukan melau-



KR-Budiono

Nana Sudjana (kanan) menerima penghargaan dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

lui kolaborasi dan sinergi dengan banyak pihak. Selain itu juga memberikan edukasi kepada calon pengantin dan remaja putri.

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin usai memberikan penghargaan mengatakan, pihaknya telah menerima laporan tentang upaya pencegahan stunting melalui intervensi serentak, yang sudah dilaksanakan di seluruh kabupa-

ten/kota. Data dari intervensi yang telah dilaksanakan tersebut, harus dapat dimanfaatkan untuk program berikutnya.

"Data ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai dasar intervensi sensitif dan spesifik, agar program yang sudah disusun dapat tepat sasaran dan target prevalensi stunting segera tercapai," tegas Ma'ruf Amin. (Bdi)-f

DIKEMBANGKAN DESA APU DALAM PILKADA 2024

Bisa Menjadi Pusat Edukasi Masyarakat

MAGELANG (KR) - Pada Pemilu 2024 lalu Bawaslub Kabupaten Magelang memiliki Desa Anti Politik Uang (APU) sebanyak 14 dan 8 Desa Pengawasan. Karena program ini dinilai berhasil, dalam konteks menjadi pusat edukasi masyarakat, maka dikembangkan menjadi Desa APU dalam Pilkada 2024.

Demikian dikemukakan Ketua Bawaslub Kabupaten Magelang M Habib Shaleh kepada KR usai membuka kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif (Soswatif) Wujudkan Netralitas ASN, TNI dan Polri Dalam Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan di Grand Artos Hotel & Convention Magelang, Rabu (4/9).

Dikatakan Habib, program ini sebetulnya tidak khusus dibangun karena ada 2 pasangan calon (paslon), tetapi ini sudah disiapkan semenjak tahun 2023 lalu. Pada saat penyusunan

anggaran Pilkada Tahun 2023, dan saat itu belum diketahui siapa paslon dan berapa jumlahnya, sudah dipersiapkan program sosialisasi pengawasan partisipatif (soswatif).

Di setiap kecamatan diberi 2 kegiatan, yaitu untuk Forkompimcam, Kades perangkat desa, yang satunya lagi untuk pembentukan Desa APU.

Setiap kecamatan atau Panwascam diberikan tanggung jawab membentuk 1 Desa APU. Ada tingkat kecamatan yang sudah bisa, ada yang membentuk

tingkat kampung yaitu Kampung APU, dan ada juga yang sudah menyatakan berani membentuk 9, yaitu Kecamatan Kaliangkrik. "Satu kecamatan berani 9, padahal di kecamatan tersebut sudah ada Desa APU-nya," katanya.

Hal ini terus dikembangkan, mengingat Desa APU ini mengajak masyarakat untuk belajar berdemokrasi. Berdemokrasi tidak hanya ketika di Pilpres atau Pilkada, tetapi juga di dalam keluarga. Juga untuk mengajak orang untuk saling menghargai, beda pilihan adalah hal yang wajar. Selain itu bersama-sama untuk menolak dan melawan politik uang.

Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi ini, Habib Shaleh mengatakan dalam kegiatan tersebut diundang Camat, Kapolsek,

Komandan Koramil, Kepala KUA, Ketua PGRI, Kepala Korwil Dinas Pendidikan, Kepala Puskesmas dan Kepala KUA dari beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang untuk mengikuti kegiatan ini.

Diharapkan apa yang terima dalam sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan pengalaman mereka, bahwa dalam kontestasi pilkada itu sikap netral sangat penting.

Forum Komunikasi Pimpinan tingkat kecamatan ini diharapkan nantinya dapat menyampaikan kepada para kepala desa, perangkat desa untuk bersikap netral. Juga diharapkan Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Kepala Korwil Pendidikan dapat menyampaikan materi yang diterima kepada jajarannya masing-masing. (Tha)-f

SMK YPP Wonogiri Pamer Mobil Tenaga Surya

WONOGIRI (KR) - Kepala Dinas P dan K Jateng Dr Uswatun Hasanah SPd MPd mendorong yayasan pendidikan yang memiliki SMK agar bekerja sama dengan kalangan perusahaan industri. Di wilayah Jateng, ada sekitar 1.558 SMK dengan kelulusan sekitar 10.000/tahun merupakan potensi yang perlu digarap secara serius.

"Dari segi kuantitas memang cukup besar tapi dari segi kualitas masih sangat kurang, ada yang baru bekerja (di industri) baru 1-2 bulan sudah keluar, ini khan harus diterima," ungkap Uswatun saat menghadiri Festival Pendidikan yang digelar Yayasan Pendidikan Pancasila (YPP) Surakarta Cabang Wonogiri di SMK Pancasila 1 Wonogiri, Kamis (5/9).

Festival Pendidikan YPP yang diikuti 12 SMK Pancasila di kabupaten itu menampilkan potensi hasil karya ketrampilan kalangan peserta didik. Selain unjuk kebolehan berbahasa Inggris dan Jepang, tamu undangan dan pengunjung disuguhi peragaan batik 'Wonogiren', minuman segar dan jamu buatan para siswa. Dari SMK Pancasila Baturetno memamerkan mobil tenaga surya yang hemat dan ramah lingkungan. Para siswa SMK Pancasila Jatisono mengenalkan kunci kontak motor berupa remot kontrol android anti curanmor.

Ketua Dewan Pembina YPP Surakarta Prof Dr Soeprayitno MM MSi menyebutkan, Festival Pendidikan YPP ini untuk memacu dan memicu kreativitas ka-



KR-Djoko Santoso HP

Dr Uswatun Hasanah SPd MPd, menandatangani naskah kerja sama.

langan SMK YPP untuk menyiapkan lulusan yang handal, terampil, mandiri dan siap pakai di sejumlah perusahaan. "Contohnya beberapa waktu lalu YPP Techno Park mengadakan pelatihan keterampilan rias wajah atau

MUA (make up artis) dan ke-trampilan 'design engineering' kini hasil sudah bisa dirasakan mereka sendiri," ujar Soeprayitno didampingi Ketua YPP Cabang Wonogiri Warno Hadi SPd. (Dsh/Qom)-f

JATENG DIPASTIKAN MASIH ZERO MPOX

Masyarakat Tetap Diminta Waspada

SEMARANG (KR) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng Yunita Dyah Suminar mengungkapkan, hingga semarang di Jawa Tengah belum ditemukan adanya kasus positif cacar monyet atau monkey pox (MPox). Meski demikian Dinkes tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada.

Demikian diungkapkan Yunita Dyah Suminar kepada wartawan di Semarang, Rabu (4/9). Kasus MPox yang ada di Brebes menurut Dyah sifatnya masih dugaan. Kasus tersebut saat ini sedang di-follow up. "Sampai hari ini masih dugaan tapi dari tanda dan gejalanya belum positif MPOX," tutur Yunita. Yunita minta kepada masyarakat untuk tenang dan tidak resah, namun tidak melepaskan kewaspadaan. Warga Jawa Tengah diharap tetap menerapkan pola hidup bersih, sehat, dan menjaga kondisi tubuh. Tahun ini virus MPox belum ditemukan di Jawa Tengah.

Terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jateng Irma Makiah menjelaskan, MPox awalnya menjangkiti binatang monyet dan bersifat zoonosis, atau dapat menular ke manusia.



KR-Budiono

Yunita Dyah Suminar

Di dunia sudah ada 99.176 kasus dengan 208 penderita diantaranya meninggal. Sedangkan di Indonesia tercatat ada 88 kasus MPox, dan semuanya telah dinyatakan sembuh.

Irma menjelaskan, penyakit ini

dapat menular saat bersentuhan dengan luka orang yang terinfeksi. Selain itu, MPox juga dapat ditularkan melalui hubungan seksual berisiko, seperti berganti-ganti pasangan dan LSL (lelaki suka lelaki). Gejalanya ada ruam, lesi (luka) bintol-bintol, demam, nyeri telan, dan yang khas ada pembesaran getah bening atau limfadenopati benjolan ada di ketiak, belakang telinga, pangkal paha, dan leher," tuturnya.

Terkait vaksin, Irma mengatakan pada tahap ini prioritasnya diberi pada populasi kunci. Di antaranya mereka yang mengidap HIV, LSL dan mereka yang memiliki risiko tinggi kontak dengan penderita MPox. Irma membeberkan meski belum ditemukan kasus MPox di Jateng, namun Dinkes Jawa Tengah telah menempuh berbagai langkah, seperti penyiapan fasilitas kesehatan, rumah sakit rujukan, dan koordinasi dengan otoritas kesehatan bandara. (Bdi)-f